

**T E S I S**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TERHADAP PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI  
PENDIRIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Diajukan Oleh :**

**Oleh :**

**AL USHUDI  
NPM : 21310004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2023**

**T E S I S**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TERHADAP PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI  
PENDIRIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**



**Diajukan Oleh :**

**Oleh :**

**AL USHUDI**  
**NPM : 21310004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2023**

**TESIS**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TERHADAP PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI  
PENDIRIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

**Diajukan Oleh :**

**Oleh :**

**AL USHUDI**  
**NPM : 21310004**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI**

**Tanggal 19 juni 2023**

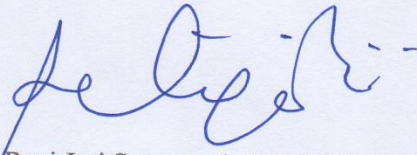
Oleh

Pembimbing I



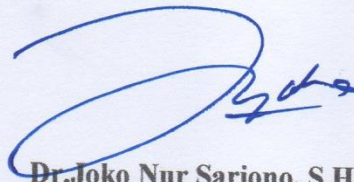
Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H

Pembimbing II



Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H

## TESIS

### KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI PENDIRIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI






Dipersiapkan dan disusun Oleh :

AL USHUDI  
NPM : 21310004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal: 22 Juli 2023

#### Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda Tangan
1. Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H.,M.Hum.	Ketua	
2. Dr. Joko Nur Sariono, S.H.,M.H.	Anggota	
3. Dr. Peni Jati Setyowati, S.H.,M.H.	Anggota	
4. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H.,M.H.	Anggota	
5. Dr. Agam Sulaksana, S.H.,M.Kn.	Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelas Magister  
Tanggal 22 Juli 2023  
Ketua Program Studi Magister Hukum



Dr. Joko Nur Sariono, S.H.,M.H

## KATA PENGANTAR

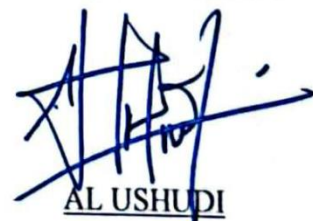
Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karunianya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu di sempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr.Sp.THT-KL(K)FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr.Umi Enggarsasi,S.H.,M.Hum,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr.Joko Nur Sariono, S.H.,M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan juga selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dorongan serta kritik dan saran dengan penuh kesabaran.
4. Pembimbing II Dr.Peni Jati Setyowati,S.H.,M.H yang telah memberikan bimbingan, dorongan serta kritik dan saran dengan penuh kesabaran.
5. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.

6. Orang tua saya Alm Bapak Warji dan Almh Ibu Taslikah yang memberikan inspirasi, dorongan semangat dan bimbingan semasa hidupnya yang menjadikan kekuatan dalam perjuangan kehidupan penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
  7. Istri saya Finita Fajar Indah dan kedua anak saya Al Farizi Putra Nareswara dan Al kahfi Narendra Putra, telah memberikan dorongan semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini.
  8. Rekan –Rekan yang tergabung dalam kantor hukum HAP Law Office, Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik, Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Gresik, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Gresik Jawa Timur/YLBHK Jatim dan serta rekan sejawat, senior-senior Lembaga Gerakan seluruh di Kabupaten Gresik yang telah memberikan dukungan dan suport atas penelitian tesis ini.
- Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Surabaya, 22 Juli 2023



AL USHUDI

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AL USHUDI

NPM : 21310004

Alamat : Ds Pundut Trate RT/RW 013/003, Benjeng, Gresik

No Tlp (HP) : 081332090838

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Perizinan Lingkungan Hidup Bagi Pendirian Pembangunan Industri” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi

Surabaya, 22 Juli 2023

Yang menyatakan,



**AL USHUDI**  
NPM 21310004

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Permasalahan dan Rumusan Masalah .....	11
2. Tujuan Penelitian .....	11
3. Manfaat Penelitian .....	12
4. Kajian Teoritis .....	13
5. Metode Penelitian .....	35
6. Sistematika Pertanggungjawaban .....	38
<b>BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TERHADAP PEMBANGUNAN INDUSTRI YANG KONDUSIF BERDASARKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP .....</b>	<b>40</b>
1. Bentuk Perizinan Pembangunan industri dari pemerintah daerah kabupaten/kota .....	40
2. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam memberikan izin lingkungan hidup .....	48
3. Kebijakan hukum pemerintah daerah kabupaten/ kota terhadap pelaku industri yang tidak memenuhi standart lingkungan hidup....	62



<b>BAB III PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA TERHADAP BERDIRINYA PEMBANGUNAN INDUSTRI .....</b>	<b>72</b>
1. Bentuk Perizinan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah kabupaten/kota .....	72
1.1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/ AMDAL.....	77
1.2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/UKL-UPL dan Surat Pernyataa Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup/SPPL .....	84
2. Pengambilan keputusan Perizinan Lingkungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.....	87
3. Akibat Hukum apabila Pendirian Industri tidak memenuhi perizinan lingkungan hidup .....	91
3.1. Bentuk tindakan hukum terhadap lingkungan hidup dalam Pengawasan dan Sanksi administrasi.....	93
3.2. Sanksi Pidana.....	99
3.3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan .....	105
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
1. Kesimpulan .....	112
2. Saran .....	113
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

## ABSTRAK

Pemerintah daerah kabupaten/Kota sebagai daerah yang diberikan wewenang daerah otonom, mempunyai hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Kewenangan membuat kebijakan untuk menjaga pelestarian Lingkungan hidup akibat pendirian pembangunan industri, penegakan Peraturan Perundang-undangan terkait Lingkungan hidup dan industri serta proses perizinan sampai tahap pengawasan masih belum sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah, oleh karena itu penelitian ini dibuat dengan judul Kebijakan Pemerintah daerah kabupaten/ kota atas izin lingkungan hidup untuk pendirian industri dengan mengangkat masalah, Pertama Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan dalam terciptanya pembangunan industri yang kondusif dan memperhatikan lingkungan hidup ?. Kedua Bagaimana izin lingkungan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota untuk berdirinya pembangunan industri ?

Penelitian ini Penulis akan mengkaji menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif (*juridic normative*) yakni bagaimana Hukum di gunakan untuk di jadikan instrumen penegakan dan penerapan mekanisme proses perizinan, pengawasan dan penindakan sampai pada memberikan Sanksi Hukum. Data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Bahan Primer meliputi dari referensi Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah dan peraturan menteri dan Data Sekunder meliputi Buku-buku, Jurnal, dokumen resmi, internet dan bahan kepustakaan yang lainnya yang berhubungan dengan perizinan lingkungan hidup dalam pembangunan industri.

Hasil Penelitian ini menghasilkan bahwa untuk mengkaji dan mengetahui ketentuan hukum Perundang-Undangan dengan kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah pusat dalam membuat keputusan mengeluarkan izin Lingkungan dalam pembangunan industri sesuai dengan ketentuan otonomi daerah karena dalam mengambil keputusan perizinan lingkungan masih dikelola oleh pemerintah pusat melalui kementerian lingkungan hidup. Otonomi Daerah masih belum memberikan kewenangan mutlak bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota serta kewenangan untuk membuat Kebijakan terhadap sanksi atau pencabutan izin bagi Perusahaan yang tidak menerapkan peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga Memberikan pemahaman tentang sanksi Administrasi, Perdata, dan Pidana. Gugatan melalui Pengadilan, diluar Pengadilan.

Kata Kunci : Kebijakan pemerintah daerah, izin lingkungan, pembangunan industri

## ABSTRACT

Regency/city regional government as a region that is given autonomous regional authority, has the right, authority and obligation to regulate and manage government affairs and the interests of the community in accordance with statutory regulations. The authority to make policies to maintain environmental preservation as a result of the establishment of industrial development, enforcement of laws and regulations related to the environment and industry as well as the licensing process up to the monitoring stage is still not fully under the authority of the regional government, therefore this research was made under the title Regency/Regency Government Policy. the city for environmental permits for industrial establishment by raising the issue, First, what are the district/municipal government policies implemented in creating conducive industrial development and paying attention to the environment? Second, what about the environmental permit granted by the regency/municipal government for the establishment of industrial development?

In this research, the author will examine using the Normative Legal Research method (normative juridical), namely how the law is used to be used as an instrument for enforcement and the application of mechanisms for the licensing process, supervision and enforcement up to giving legal sanctions. The research data includes primary and secondary data. Primary Material includes references to Legislation, Government Regulations and ministerial regulations and Secondary Data includes books, journals, official documents, internet and other library materials related to environmental permits in industrial development.

The results of this research resulted in that to study and find out the legal provisions of laws and regulations with the policies of the Regency/City regional government and the central government in making decisions on issuing environmental permits in industrial development in accordance with the provisions of regional autonomy because environmental licensing decisions are still managed by the central government through Ministry of Environment. Regional Autonomy still does not give absolute authority to Regency/City Regional Governments as well as the authority to make policies against sanctions or revocation of permits for companies that do not implement applicable regulations. This research also provides an understanding of Administrative, Civil and Criminal sanctions. Lawsuit through the Court, outside the Court.

Keywords: Local government policies, environmental permits, industrial development

